

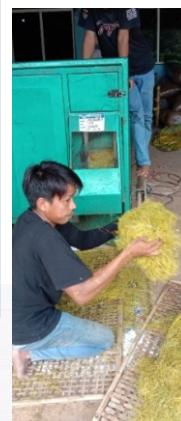


KEMENTERIAN PERTANIAN



Laporan Tahunan 2024

**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
PASCAPANEN PERTANIAN**



LAPORAN TAHUNAN

**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
PASCAPANEN PERTANIAN
2024**



**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

Laporan Tahunan
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
2024

Penyunting : Dr. Asmarhansyah, SP., M.Sc.
Laila Kadar, S.E., M.Si

Redaksi Pelaksana : Kun Tanti Dewandari, S.TP., M.Si
Tatiek Kartika Swara Mahardika, STP, M.Si
Masriska Hanum, SA

Cover dan Tata Letak : Rizaluddin, AMd

Penerbit : Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu
Jalan Tentara Pelajar No. 12
Telepon : 0251-8321762; Faksimili: 0251-8350920
<https://pascapanen.bsip.pertanian.go.id/>

Dicetak atas biaya DIPA BBPSI Pascapanen Pertanian TA. 2025

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-Nya sehingga Laporan Tahunan Balai Besar Pengujian Standar instrumen Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen Pertanian) TA.2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan tahunan ini merupakan laporan tahunan pertama sejak Balai Besar Litbang Pascapanen bertransformasi menjadi BBPSI Pascapanen Pertanian sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban BBPSI Pascapanen Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama satu tahun di bidang pengujian standar instrumen pascapanen pertanian dalam perencanaan program, evaluasi, pengelolaan keuangan, manajerial, teknis, penyebarluasan hasil standardisasi dan capaian kegiatan strategis termasuk hambatan dan tantangan yang dihadapi.

BBPSI Pascapanen Pertanian juga telah melaksanakan sejumlah layanan pengujian analisis sampel di Laboratorium, perumusan RSNI, Bimbingan teknis, magang dan praktek kerja lapang (PKL), layanan informasi dan konsultasi/studi banding/kunjungan, serta layanan perpustakaan terkait pascapanen pertanian. Nilai indeks unit pelayanan pada semester II TA.2024 mencapai nilai 3,64 setara dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 91,23 termasuk kategori mutu pelayanan A atau kinerja unit pelayanan dengan kategori Sangat Baik. Responden pelanggan layanan analisis uji laboratorium dan informasi teknologi yang terdiri dari Pelajar, Mahasiswa, Dosen, Wiraswasta, PNS, Pengusaha.

Indikator kinerja utama program dukungan manajemen berdasarkan nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dan SMART/DJA dengan target 82 (nilai), dan hasil evaluasi silang oleh Tim Penilai lingkup BSIP mencapai nilai 90,02. Sedangkan nilai kinerja anggaran mencapai nilai 96,86 dari target 92,44. Buku Laporan Tahunan BBPSI Pascapanen TA.2024 diharapkan menjadi sarana penyampaian informasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPSI Pascapanen Pertanian kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan tersebut dapat terlaksana atas kerja sama dan partisipasi berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyusunan laporan tahunan BBPSI Pascapanen Pertanian TA.2024. Kami menyadari bahwa laporan tahunan ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak keterbatasan dalam penyajian informasi, kami

harapkan masukan dan saran yang dapat meningkatkan kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian di tahun berikutnya. Selain itu, Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan acuan dalam menyusun rencana kerja pada tahun selanjutnya.

Bogor, Januari 2025

Kepala Balai Besar,



Dr. Asmarhansyah, SP., M.Sc.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
I. PENDAHULUAN	1
II. PROFIL BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN	3
2.1 Sarana dan Prasarana	4
2.2 Sumber Daya Manusia.....	4
2.3 Pengembangan Kompetensi SDM	6
III. PROGRAM DAN ANGGARAN	7
3.1 Program dan Sasaran Kegiatan	7
3.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) TA.2024.....	8
3.3 Penyusunan RKAKL dan Revisi Anggaran TA.2024	9
IV. STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN	10
4.1 Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	10
4.1.1 RSNI Proses Pascapanen Daun Rajangan Kering Talas Beneng (<i>Xanthosoma undipes</i> K. Koch.).....	10
4.1.2 RSNI Pedoman Proses Pascapanen Bawang Merah (<i>Allium cepa</i> var. <i>ascalonicum</i> syn <i>Allium cepa</i> var <i>aggregatum</i>) Konsumsi.....	11
4.1.3 RSNI Metode Pengukuran Susut Pascapanen Padi	12
4.1.4 RSNI Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian	14
4.2 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)	16
4.2.1 Operasionalisasi LSPro	16
4.2.2 Operasionalisasi LembagaPemeriksa Halal (LPH).....	16
4.3 Pengelolaan Sekretariat Mirror Committee Codex.....	19
4.4 Program Nasional Perumusan Standar (PNPS).....	21
V. INSTRUMEN MUTU PASCAPANEN PERTANIAN YANG DIUJI	23
5.1 Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium.....	23
5.2 Pembentukan Jejaring Basis Data Komposisi Pangan Asia.....	24

	Halaman
VI. DUKUNGAN MANAJEMEN	26
6.1 Pelaksanaan Pengelolaan BMN	26
6.2 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.....	26
6.3 Pelaksanaan Monev, SPI, Manajemen Risiko Index, Reformasi Birokrasi	30
6.3.1 Sosialisasi SPI lingkup BBPSI Pascapanen.....	30
6.3.2 Monitoring Program Strategis Kementan.....	32
VII. KINERJA ANGGARAN	34
VII. PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Daftar Diklat Jangka Pendek	6
Tabel 2. Renja BBPSI Pascapanen Pertanian	7
Tabel 3. Sasaran, Indikator, Target Perjanjian Kinerja BBPSI Pascapanen pada PK Awal dan Revisi Akhir Tahun 2024.....	8
Tabel 4. Anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian pada PK awal dan revisi akhir Tahun 2024.....	8
Tabel 5. Revisi DIPA BBPSI Pascapanen Pertanian	9
Tabel 6. Tahapan Penyusunan Draft RSNI Proses Pascapanen Talas Beneng.....	11
Tabel 7. Tahapan Penyusunan Draft RSNI pedoman Proses Bawang Merah	12
Tabel 8. Tahapan Penyusunan Draft RSNI Metode Pengukuran Susut Padi.....	14
Tabel 9. Penyusunan Draft RSNI Batas Minimum Residu Pestisida.....	15
Tabel 10. Rekapitulasi komoditas, lokasi, dan waktu pengambilan sampel	25
Tabel 11. Peserta kunjungan selama kurun waktu Januari-Desember 2024.....	27
Tabel 12. Peserta magang/PKL kurun waktu Januari-Desember.....	27
Tabel 13. Nilai Indeks unit pelayanan dan Mutu Unit Pelayanan Semester I dan II 2024.....	28
Tabel 14. Nilai persepsi kualitas pelayanan (SPKP) masyarakat pada setiap unsur pada setiap Triwulan.....	29
Tabel 15. Nilai persepsi anti korupsi pada setiap unsur pada setiap Triwulan	29
Tabel 16. Laporan gratifikasi	31
Tabel 17. Rekapitulasi pengaduan masyarakat	32
Tabel 18. Rekapitulasi pengaduan masyarakat	33
Tabel 19. Realisasi Anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian	34

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi BBPSI Pascapanen Pertanian	3
Gambar 2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan	5
Gambar 3. Keragaan Pegawai BBPSI Pascapanen Pertanian Tahun 2024	5
Gambar 4. Pengambilan sampel uji di lokasi sentra.....	10
Gambar 5. Proses sortasi dan grading	12
Gambar 6. Pengukuran Susut Penggilingan	13
Gambar 7. Survei pengambilan sampel	15
Gambar 8. Kunjungan dan penjajagan calon klien sertifikasi	17
Gambar 9. Sertifikat akreditasi LPH BBPSI Pascapanen	17
Gambar 10. Kegiatan asesmen akreditasi LPH.....	18
Gambar 11. Kegiatan audit/pemeriksaan halal lingkup jasa penyembelihan	18
Gambar 12. Kegiatan audit/pemeriksaan halal lingkup usaha makanan dan minuman.....	19
Gambar 13. Rapat sosialisasi hasil sidang CCPR ke-54.....	20
Gambar 14. Koordinasi dengan Ditjen lingkup Kementan	22
Gambar 15. Sertifikat akreditasi lab.BBPSI Pascapanen.....	23
Gambar 16. Pemeliharaan aset di Bogor dan Karawang	26
Gambar 17. Pelatihan Pelayanan Publik	28
Gambar 18. Sertifikat Keterbukaan Informasi Publik	29
Gambar 19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	34

I. PENDAHULUAN

BBPSI Pascapanen Pertanian merupakan *Business Unit* Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Sesuai *hierarchical strategic plan*, maka visi dan misi BBPSI Pascapanen Pertanian mengacu pada visi dan misi pembangunan pertanian dan prioritas program BSIP dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2023-2024 Kementerian Pertanian yang diarahkan untuk dapat menjamin ketahanan pangan dan energi dalam mendukung ketahanan nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian merupakan lahirnya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) di Kementerian Pertanian, bagian kesembilan Pasal 29, BSIP memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Sedangkan fungsi BSIP: a) penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian; b) pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian; c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian; d) pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Definisi pascapanen dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budiaya Pertanian Berkelanjutan adalah kegiatan penanganan hasil panen yang

bertujuan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan mutu, menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan daya guna serta nilai tambah hasil budi daya Pertanian. Sedangkan UU Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, definisi standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, mengawasi, dan harmonisasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional. Pada era persaingan global saat ini, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) bidang pertanian menjadi vital untuk memberikan jaminan kualitas dan keamanan pangan dalam rangka mendukung perdagangan adil dan perlindungan masyarakat. Tujuan akhir kegiatan SPK bidang pertanian adalah terwujudnya jaminan mutu hasil pertanian sesuai SNI, regional, maupun internasional. Dengan demikian, SPK dapat dipergunakan sebagai sarana

dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Program peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian menjadi agenda penting bagi BBPSI Pascapanen Pertanian untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pertanian dan daya saing produk pertanian. SPK merupakan tuisi BSIP yang menjadi salah satu cara untuk mencapai peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian tersebut.

BBPSI Pascapanen Pertanian merupakan unit organisasi yang membidangi masalah pascapanen dan hilirisasi pertanian serta memiliki tugas melaksanakan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian, dengan menyelenggarakan fungsi antara lain : penyusunan rencana program dan anggaran, pelayanan analisis dan pengujian, pengelolaan instrumen hasil standardisasi pascapanen pertanian, penyebarluasan hasil standar instrumen pascapanen pertanian serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian. merupakan unit organisasi yang membidangi masalah pascapanen dan hilirisasi pertanian.

II. PROFIL BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian sebagai salah satu unit pelaksana teknis dibawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian bertugas melaksanakan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian dan merumuskan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI). Sedangkan untuk menjalankan tugas tersebut, BBPSI Pascapanen Pertanian melaksanakan fungsi yaitu melaksanakan analisis, pengujian, kalibrasi dan sertifikasi produk, proses dan jasa (LSPro) serta pemeriksa halal (LPH), pengembangan serta penerapan standar instrumen pascapanen pertanian.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, BBPSI Pascapanen terus berkembang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan 13 layanan dilengkapi sarana dan prasarana berupa laboratorium yang terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017. Sarana laboratorium yang berfungsi sebagai layanan dan pengujian untuk

menunjang optimalisasi dan kualitas kinerja, yaitu Laboratorium Kimia, Fisika, Nanoteknologi, Mikrobiologi yang berlokasi di Bogor dan Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serealiala berlokasi di Karawang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17043:2010 serta menjadi Laboratorium Rujukan Pengujian Mutu Beras di Indonesia.



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPSI Pascapanen Pertanian

2.1 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana BBPSI Pascapanen Pertanian mempunyai dua fungsi yang meliputi gedung perkantoran untuk kegiatan administratif dan gedung laboratorium yang berlokasi di Bogor dan Karawang. Laboratorium BBPSI Pascapanen Pertanian yang berada di Bogor adalah Laboratorium Kimia, Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Nanoteknologi, Laboratorium Fisik, Laboratorium Organoleptik, Laboratorium Pengolahan, Laboratorium Penanganan Segar, dan Laboratorium Pengembangan. Sedangkan Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serealiala berlokasi di Karawang dan telah mendapat sertifikasi sebagai laboratorium rujukan (PUP/ Penyelenggara Uji Profisiensi) dengan nomor sertifikat PUP-024 IDN.

Laboratorium BBPSI Pascapanen Pertanian berfungsi sebagai (i) fasilitas utama kegiatan standardisasi instrumen pascapanen pertanian, (ii) laboratorium pengujian/jasa analisis untuk menghasilkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan sebagai bentuk optimalisasi aset negara bagi kepentingan pembangunan nasional, (iii) fasilitas pelatihan/ bimbingan teknis atau layanan kunjungan dan studi banding, dan (iv) laboratorium rujukan. Laboratorium BBPSI Pascapanen telah mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai laboratorium pengujian yang mengimplementasikan SNI ISO/ IEC 17025:2008. Beberapa peralatan pada laboratorium akreditasi antara lain instrumen pengujian seperti HPLC, GC, *spektrofotometer*, *amilograph*, *texture analyzer*. Sedangkan laboratorium pengolahan menangani pengolahan aneka tepung, roti-rotian dan mie, pengolahan minuman, ekstraksi atsiri dan bahan aktif, pengolahan daging,

susu, bioprosesing dan pengemasan produk. Laboratorium penanganan bahan termasuk penanganan segar komoditas tanaman pangan (serealiala dan umbi-umbian), hortikultura (buah, sayuran, dan biofarmaka), dan peternakan (daging, susu dan telur). Beberapa peralatan di laboratorium pengembangan diantaranya ekstraktor minyak atsiri, peralatan pengeringan (*spray drier*, *molen drier*, *far infra red drier*), mesin penepungan, penyosoh sorgum, mesin pascapanen padi terpadu, peralatan pengolahan roti dan mie, alat pengemas, dan sebagainya.

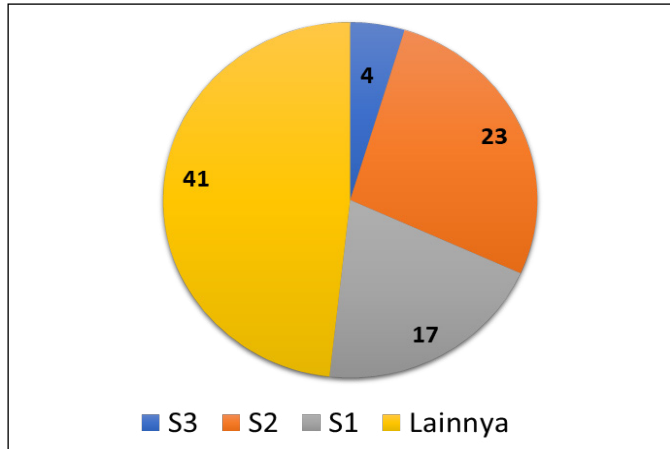
BBPSI Pascapanen Pertanian juga memiliki sarana perpustakaan sekaligus sebagai tempat promosi hasil pengembangan inkubator bisnis dalam mempercepat adopsi dan hilirisasi teknologi pascapanen pertanian yang telah dihasilkan. Keseluruhan aset laboratorium tersebut masih menjadi aset BBPSI Pascapanen Pertanian, karena kegiatan pengujian di laboratorium merupakan *core bussines* utama di BBPSI Pascapanen Pertanian sebagai organisasi yang menjalankan fungsi standardisasi.

2.2 Sumber Daya Manusia

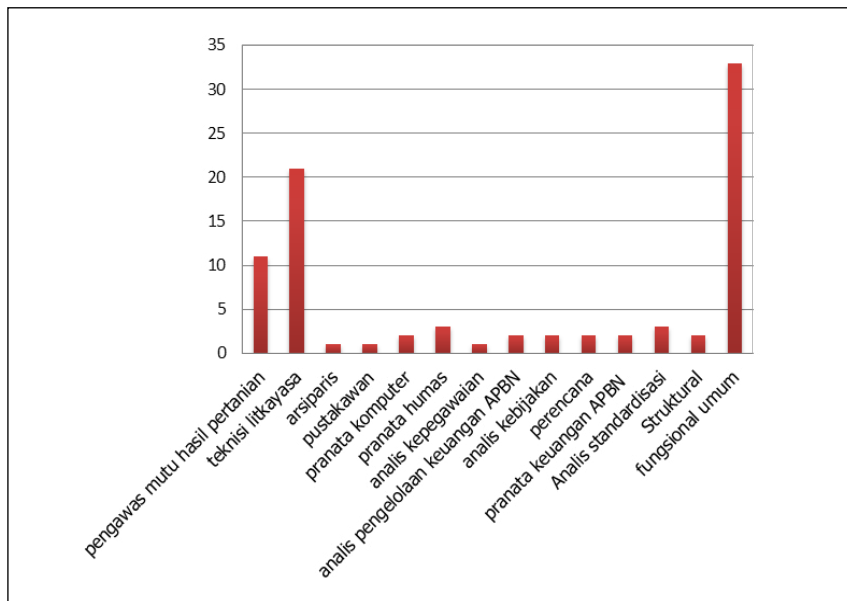
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPSI Pascapanen Pertanian didukung oleh 44 orang personel yang profesional, kompeten dengan kualifikasi S1, S2, S3 dalam berbagai jabatan fungsional serta 41 orang dengan pendidikan lainnya (Gambar 2). Sumberdaya manusia BBPSI Pascapanen tersebar dalam berbagai jabatan fungsional yaitu pengawas mutu hasil pertanian (11 orang), teknisi litkayasa (20 orang), arsiparis (1 orang), pustakawan (1 orang), pranata komputer (2 orang), pranata humas (3

orang), analis kepegawaian (1 orang), analis pengelolaan keuangan APBN (2 orang), analis kebijakan (2 orang), perencana (2 orang), pranata keuangan APBN (2 orang), analis standarisasi

(3 orang). Selebihnya merupakan fungsional umum sejumlah 35 orang. Komposisi SDM menurut jabatannya di masing-masing UK/UPT sebagaimana disajikan dalam Gambar 3.



Gambar 2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Gambar 3. Keragaan Pegawai BBPSI Pascapanen Pertanian Tahun 2024

2.3 Pengembangan Kompetensi SDM

Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi diperlukan dalam peningkatan mutu, profesionalisme untuk melaksanakan

tugas sesuai dengan tugas pokok fungsi masing masing pegawai. Pada tahun 2024, beberapa pegawai BBPSI Pascapanen telah mengikuti berbagai diklat peningkatan kompetensi.

Tabel 3. Daftar Diklat Jangka Pendek sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Diklat Jangka Pendek

No	Nama	Judul Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Tempat Pelatihan
1	Imia Ribka	Pengantar Standardisasi	23/04/2024	online (https://elearning.bsn.go.id)
		Pengantar Penilaian Kesesuaian	14/05/2024	https://elearning.bsn.go.id
		SNI ISO 9001:2015 Persyaratan Sistem Manajemen Mutu	21/05/2024	https://elearning.bsn.go.id
2	Erwan Gustian Apriyansyah	Copywriting Media Sosial Instansi Pemerintah untuk menarik minat netizen	21/05/2024	Loman Park Hotel Yogyakarta
3	Dwi Agriana, A.Md	How to be a Great Laboratory Supervisor	13/01/2024	Lab Mania, Sumarecon, Bekasi
4	Apriandra Prastama	Pelatihan TOEFL ITP + test resmi TOEFL	12/03/2024	Online Class
5	Maritsya Dita Kurnia Putri	Kelas Pengetahuan How to Be Great Laboratory Supervisor	13/01/2024	Lab Mania Learning Center, Bekasi
6	Miskiyah	Pelatihan Juru Sembelih Halal	02/12/2024	Halal Science Center IPB University
		Pengantar Standardisasi	05/12/2024	website https://elearning.bsn.go.id
7	Tatiek Kartika SM, STP, M.Si	Bimtek Jabfung Perencana lingkup Kementan	25/04/2024	D.I Yogyakarta
8	Kun Tanti Dewandari	Pelatihan TOEFL	03/06/2024	Online dengan Penyelenggara Kampung Inggris Pare Kediri
9	Winda Haliza	SNI ISO 9001 : 2015 Persyaratan Sistem Manajemen Mutu	21/05/2024	website https://elearning.bsn.go.id

III. PROGRAM DAN ANGGARAN

3.1 Program dan Sasaran Kegiatan

Program dan sasaran kegiatan BBPSI Pascapanen Pertanian difokuskan menghasilkan standar instrumen pascapanen pertanian dan penilaian kesesuaian untuk penjaminan mutu dan keamanan pangan untuk melindungi konsumen yang mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor. Dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan diperlukan dukungan manajemen untuk meningkatkan kualitas serta pengelolaan sumber daya standardisasi dan penilaian kesesuaian melalui penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi, dan manajemen internal serta layanan umum.

Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK) BBPSI Pascapanen Pertanian tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dengan indikator sasaran: Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan.
2. Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator sasaran: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian;
3. Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator sasaran: Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian.

Tabel 2. Renja BBPSI Pascapanen Pertanian

Kode	Program Kegiatan/ Output	Satuan
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	
6916.ADA	Standarisasi Produk	
6916.ADA.107	Rancangan Standar Instrumen Pascapanen	4.0 Standar
6916.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	
6916.BJA.108	Instrumen Mutu Pascapanen Pertanian yang diuji	199.0 Produk
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen	
6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
6918.EBA.956	Layanan BMN	1.0 Layanan
6918.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan
6918.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Layanan
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.0 Layanan
6918.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Layanan

3.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) TA.2024

Perjanjian Kineerja yang disusun adalah PK pada level Kepala UPT BBPSI Pascapanen Pertanian dalam melaksanakan mandat pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian serta Program Dukungan

Manajemen. Perjanjian Kinerja (PK) BBPSI Pascapanen Pertanian pada tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp18.021.436.000,00. Selama tahun 2024, terjadi beberapa kali revisi PK karena adanya perubahan pimpinan, alokasi anggaran, dan perubahan indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di akhir tahun 2024.

Tabel 3. Sasaran, Indikator, Target Perjanjian Kinerja BBPSI Pascapanen pada PK Awal dan Revisi Akhir Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kegiatan	Target	
			Awal	Akhir
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	4 Standar	4 Standar
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	82 Nilai	82 Nilai
3	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	85 Nilai	92,44 Nilai

Tabel 4. Anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian pada PK awal dan revisi akhir Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	
		Awal	Akhir
	Total	Rp 18.049.452.000	Rp 18.012.436.000
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 1.700.000.000	Rp 2.074.722.000
	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 1.700.000.000	Rp 2.074.722.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 16.349.452.000	Rp 15.937.714.000
	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 16.349.452.000	Rp 15.937.714.000

3.3 Penyusunan RKAKL dan Revisi Anggaran TA.2024

Pagu alokasi anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 24 SP DIPA- 018.09.2.648669/2024, tanggal 24 Nopember 2024 sebesar Rp18.049.452.000,00 mencakup Program Nilai Tambah dan Daya Saing inustri dan Dukungan Manajemen.

Seiring pelaksanaan kegiatan perlu adanya penyesuaian sehingga dilakukan revisi DIPA BBPSI Pascapanen Pertanian sebanyak 19 (sembilan belas kali). Revisi tersebut dilakukan dikarenakan perubahan kebijakan nasional lingkup Kementerian Pertanian termasuk BSIP agar tujuan pelaksanaan kegiatan dapat dicapai secara maksimal (Tabel 5). Sampai akhir tahun 2024, alokasi anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian sebesar Rp18.012.436.000,-

Tabel 5. Revisi DIPA BBPSI Pascapanen Pertanian

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	
		Awal	Akhir
	Total	Rp 18.049.452.000	Rp 18.012.436.000
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 1.700.000.000	Rp 2.074.722.000
	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 1.700.000.000	Rp 2.074.722.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 16.349.452.000	Rp 15.937.714.000
	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 16.349.452.000	Rp 15.937.714.000
	Blokir	Rp 1.508.602.000	Rp 491.252.000,00
	Anggaran tersedia	Rp 16.540.850.000	Rp 17.521.184.000

IV. STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN

4.1 Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

Standar instrumen pascapanen pertanian sangat diperlukan untuk menjamin mutu dari suatu proses dan produk hasil pertanian. Penerapan standar yang baik, akan mendorong potensi pertanian Indonesia mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Keluaran yang diharapkan pada kegiatan ini adalah dihasilkannya rumusan konsep RSNI sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru namun telah diawali dengan koordinasi dan survei lapang secara terbatas untuk mengumpulkan informasi. Dalam rangka pencapaian output, maka tahapan pelaksanaan kegiatan, antara lain: 1) Koordinasi dengan komite teknis, stakeholder dan pihak terkait dalam penyusunan/ revisi konsep RSNI, 2) Survei lokasi dan pengambilan sampel, 3) Melakukan pengujian dan 4) Penyusunan draft RSNI melalui konsensus dengan seluruh pihak terkait dan 5) Pelaporan.

Selama tahun 2024 BSIP Pascapanen dengan kolaborasi antara tim konseptor dan Komite Teknis 65-22 Pascapanen Pertanian menghasilkan 4 (empat) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI3) yang telah ditetapkan sebagai SNI oleh Badan Standardisasi Nasional. Keempat RSNI yang telah dihasilkan antara lain: 1) SNI 9279:2024 Pedoman Proses Pascapanen Daun Talas Beneng, 2) SNI 9289:2024 Pedoman Proses Pascapanen Bawang Merah (*Allium cepa* var. *ascalonicum* syn *Allium cepa* var *aggregatum*) Konsumsi, 3)

SNI 7313:2024 Batas Maksimum Residu Pestisida, dan 4) SNI 9306:2024 Metode Pengukuran Susut Padi Pascapanen Padi (*Oryza sativa* L.).

4.1.1 RSNI Proses Pascapanen Daun Rajangan Kering Talas Beneng (*Xanthosoma undipes* K. Koch.)

Talas Beneng (*Xanthosoma undipes* K. Koch) merupakan tanaman yang potensial untuk dikembangkan sebagai sumber bahan pangan alternatif dan memiliki kandungan gizi yang baik. Seiring berkembangnya sentra produksi serta perdagangannya sehingga diperlukan standar khusus mengenai proses penanganan pascapanen dan produk daun rajangan kering talas beneng. Standar yang dihasilkan sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha sebagai jaminan produk.



Gambar 4. Pengambilan sampel uji di lokasi sentra

Kegiatan perumusan SNI ini diawali survei dan koordinasi dengan stakeholder terkait (industri, pelaku usaha, asosiasi, eksportir, direktorat teknis, masyarakat) dan dilanjutkan dengan pengambilan sampel. Tahapan penyusunan RSNI3 diawali dengan rapat teknis dan selanjutnya disepakati dalam rapat konsensus, Jajak pendapat dan penetapan SNI (Tabel 6). SNI ini telah ditetapkan menjadi SNI berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 537/KEP/BSN/2024 tentang Penetapan SNI 9279:2024 Pedoman Proses Pascapanen Daun Talas Beneng (*Xanthosoma undipes* K.Koch) pada tanggal 6 November 2024.xx

4.1.2 RSNI Pedoman Proses Pascapanen Bawang Merah (*Allium cepa* var. *ascalonicum* syn *Allium cepa* var *aggregatum*) Konsumsi

Bawang merah merupakan sayuran yang mempunyai nilai jual tinggi, menguntungkan dan mempunyai

pasar yang luas. Bawang merah dibutuhkan sebagai rempah pada hampir semua masakan Indonesia serta dalam industri pangan sebagai penyedap rasa. Konsumsi dan permintaan bawang merah terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah dan kebutuhan penduduk serta berkembangnya pasar industri pangan. Kualitas bawang merah yang baik, harus diikuti oleh proses penanganan pasca panen bawang merah yang baik dan benar guna menurunkan tingkat kehilangan hasil, memperpanjang umur simpan, meningkatkan daya saing dan kualitas produk bawang merah. Agar dapat mengurangi jumlah kehilangan hasil panen maka perlu disusun standar mengenai penanganan pascapanen bawang merah untuk konsumsi. Kegiatan penyusunan RSNI Pedoman Proses Pascapanen Bawang Merah Konsumsi diawali dengan kunjungan ke lapang untuk melihat proses penanganan di lapang termasuk diantaranya sortasi dan grading (Gambar 5).

Tabel 6. Tahapan Penyusunan Draft RSNI Proses Pascapanen Talas Beneng

Kegiatan	Pembahasan
Rapat Teknis 1, 6 Agustus 2024	Perbaikan pada judul, prakata, ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, bahan baku, peralatan, prosedur panen dan prosedur pascapanen.
Rapat Teknis 2, 21 Agustus 2024	Klarifikasi terkait proses pascapanen yang meliputi pengangkutan, pemeraman, perajangan, pengeringan, pengemasan, penyimpanan, persyaratan mutu, kadar air, dan kebersihan
Rapat Konsensus, 30 Agustus 2024	Pembacaan draf RSNI 2, disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 30 Agustus 2024 dengan hasil akhir disetujui menjadi Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI 3).
Jajak Pendapat, 23 September - 22 Oktober 2024	Pelaksanaan jajak pendapat dilakukan oleh stakeholder terkait dengan memberikan masukan yang bersifat editorial.
6 November 2024	Penetapan menjadi SNI berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 537/KEP/BSN/2024 tentang Penetapan SNI 9279:2024 Pedoman Proses Pascapanen Daun Talas Beneng (<i>Xanthosoma undipes</i> K.Koch).

Proses perumusan SNI dilakukan melalui dua kali rapat teknis dan satu kali rapat konsensus yang dilanjutkan dengan Jajak Pendapat dari tanggal 1 Oktober s.d. 30 Oktober 2024 (Tabel 7). Pada tanggal 6 November 2024, telah ditetapkan menjadi SNI berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 554/KEP/BSN/2024 tentang Penetapan SNI 9289:2024 Pedoman Proses bawang merah (*Allium cepa* var. *ascalonicum* syn *Allium cepa* var. *aggregatum*) konsumsi.

4.1.3 RSNI Metode Pengukuran Susut Pascapanen Padi

Beras merupakan komoditas pangan strategis di Indonesia karena selain beras menjadi sumber utama karbohidrat pada pangan pokok sebagian besar penduduk Indonesia, beras juga melibatkan jutaan penduduk dalam proses produksi, perdagangan maupun industri yang berkaitan dengan beras. Pada tahun 2022/2023, Indonesia menjadi negara dengan volume konsumsi beras terbesar keempat di dunia, yang konsumsinya mencapai 35,3 juta metrik ton.



Gambar 5. Proses sortasi dan grading

Tabel 7. Tahapan Penyusunan Draft RSNI pedoman Proses Bawang Merah

Kegiatan	Pembahasan
Rapat Teknis 1, 6 Agustus 2024	Perbaikan pada judul, prakata, ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, Sub-pasal baru termasuk pelayuan, pemotongan daun, sortasi, pengkelasan, dan pengemasan, dan proses pascapanen
Rapat Teknis 2, 30 Agustus 2024	revisi terkait istilah dan definisi, prosedur pelayuan, pemotongan, dan perubahan istilah pengkelasan menjadi pengelompokan
Rapat Konsensus, 13 September 2024	Memastikan RSNI yang dihasilkan relevan dan praktis untuk diterapkan sebagai pedoman proses pascapanen bawang merah konsumsi, sekaligus mendukung pengelolaan hasil panen secara lebih efisien dan sesuai standar.
Jajak Pendapat, 1 Oktober - 30 Oktober 2024	Pelaksanaan jajak pendapat dilakukan oleh stakeholder terkait dengan memberikan masukan yang bersifat editorial.
18 November 2024	Penetapan menjadi SNI berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 554/KEP/BSN/2024 tentang Penetapan SNI 9289:2024 Pedoman Proses bawang merah (<i>Allium cepa</i> var. <i>ascalonicum</i> syn <i>Allium cepa</i> var. <i>aggregatum</i>) konsumsi

Beberapa strategi yang dapat diterapkan secara terpadu oleh pemerintah, petani, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memenuhi kebutuhan beras adalah: 1) Peningkatan produksi padi melalui penggunaan benih unggul, perluasan areal tanam, optimalisasi lahan, dan penerapan teknologi pertanian pada tahap budidaya; dan 2) Penanganan pascapanen padi untuk menekan tingkat susut hasil. Untuk menentukan tingkat susut pascapanen padi di setiap tahapan pascapanen padi diperlukan metode pengukuran susut pascapanen yang terstandar. Hal ini karena susut pascapanen padi berdampak terhadap ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi dihitung dari kerugian secara ekonomi yang akan didapatkan, sedangkan dampak sosial karena jumlah padi yang tidak diolah dapat digunakan untuk memberikan pasokan pangan bagi

masyarakat. Melalui metode pengukuran susut yang terstandar, diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi dan meminimalisasi kerugian ekonomi tersebut. SNI metode pengukuran susut pascapanen padi dapat membantu dalam memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat susut yang terjadi di setiap tahap pascapanen.

Penyusunan RSNI metode pengukuran susut padi dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan aspek teknis yang sistematis. Ruang lingkup kegiatan penyusunan RSNI Metode pengukuran susut pascapanen padi meliputi desk study untuk pengumpulan data dan informasi, pengukuran susut untuk konfirmasi metode, koordinasi dan diskusi, rapat konseptor untuk menyusun draf RSNI, rapat teknis dengan Komite Teknis 65-22, rapat konseptor dan jajak pendapat.



Gambar 6. Pengukuran Susut Penggilingan

Rapat teknis dilakukan bersama dengan Komite Teknis 65-22 Pascapanen Pertanian untuk membahas draf RSNI yang sudah disusun oleh tim konseptor. Rapat teknis dilakukan sebanyak 3 kali dilanjutkan dengan rapat konsensus, jajak pendapat hingga penetapan oleh BSN (Tabel 8). RSNI Metode Pengukuran Susut Pascapanen Padi (*Oryza sativa* L.) telah ditetapkan menjadi SNI 9306:2024 Metode pengukuran susut pascapanen padi (*Oryza sativa* L.) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 649/KEP/BSN/12/2024, ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2024.

4.1.4 RSNI Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian

Batas maksimum residu yang selanjutnya disingkat BMR adalah merupakan batas maksimum residu pestisida yang diperbolehkan terdapat dalam hasil pertanian. Penentuan batas ini bertujuan untuk melindungi kesehatan konsumen dari kandungan berlebih residu pestisida dalam pangan. Setiap negara memiliki kebijakan pertanian masing-masing mengenai batas residu maksimum dan asupan harian yang dapat diterima.

Tabel 8. Tahapan Penyusunan Draft RSNI Metode Pengukuran Susut Padi

Kegiatan	Pembahasan
Rapat Teknis 1, 21 Agustus 2024	Perubahan judul, ruang lingkup draf RSNI diubah untuk menggunakan kalimat yang lebih efektif, istilah dan definisi diurutkan secara alfabetis, penyusunan langkah perhitungan dibuat dalam dua versi dan penyebutan timbangan didasarkan pada ketelitian, perubahan susunan subbab dan informasi tentang variabel yang mempengaruhi hasil susut pascapanen padi di lampiran Draft RSNI
Rapat Teknis 2, 12 September 2024	Beberapa masukan penting yang diterima diantaranya adalah, spesifikasi timbangan untuk memudahkan identifikasi klarifikasi ukuran papan pengamatan, penulisan simbol yang konsisten, definisi alat perontok, tambahan kata minimum pada ukuran terpal, kontrol pada pengukuran susut perontokan penyesuaian prinsip pada susut pengangkutan serta pengeringan, penambahan kata portabel pada alat pengukur kadar air, penyesuaian judul tabel untuk mencerminkan isi tabel dengan lebih akurat
Rapat Teknis 3, 3 Oktober 2024	Penyesuaian prinsip pengukuran susut penggilingan dengan rumus perhitungan, penambahan label dan alat tulis pada peralatan, penyesuaian penyebutan peralatan, penyempurnaan prosedur dan rumus perhitungan.
Rapat Konsensus, 3 Oktober 2024	Dalam rapat ini disepakati beberapa perubahan yaitu, penambahan nama latin pada judul dan prakata, penyederhanaan dalam bagian Istilah dan definisi, penyesuaian dalam prosedur, peralatan pengukuran dan rumus perhitungan susut.
Jajak Pendapat, 24 Oktober - 22 Nopember 2024	Pelaksanaan jajak pendapat dilakukan oleh stakeholder terkait dengan memberikan masukan yang bersifat editorial.
12 Desember 2024	Penetapan menjadi SNI dengan Nomor SNI 9306:2024 Metode pengukuran susut pascapanen padi (<i>Oryza sativa</i> L.) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 649/KEP/BSN/12/2024

Di Indonesia BMR pestisida pada hasil pertanian diatur pada SNI 7313:2008 Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. Berdasarkan hasil kaji ulang SNI 7313:2008 Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian yang dilakukan oleh Komite Teknis 65-22 Pascapanen Pertanian, struktur penyusunan dan isi SNI 7313:2008 sudah tidak relevan sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan standar internasional. Berdasarkan Surat Keputusan BSN Nomor 2/KEP/BSN/1/2024 tentang Program Nasional Perumusan Standar Nasional Indonesia

Tahun 2024 ditetapkan SNI 7313:2008 sebagai SNI revisi dibawah Komite Teknis 65-22 Pascapanen Pertanian.

Kegiatan revisi SNI 7313:2008 dilakukan bersama sdengan Balai Pengujian Lingkungan dan beberapa tahapan meliputi : koordinasi internal dan eksternal, focus group discussion (FGD), survei untuk pengambilan sampel serta pengujian sampel. Tahapan selanjutnya adalah pembahasan revisi SNI 7313:2008 yang terdiri dari rapat konseptor, rapat teknis 1, rapat teknis 2, rapat konsensus, jajak pendapat dan penetapan SNI yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 9. Revisi SNI ini ditetapkan menjadi SNI pada tanggal 12 Desember 2024 melalui Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 648/KEP/BSN/12/2024.



Gambar 7. Survei pengambilan sampel

Tabel 9. Penyusunan Draft RSNI Batas Minimum Residu Pestisida

Kegiatan	Pembahasan
Rapat Teknis 1, 6 Agustus 2024	perubahan judul, pembatasan ruang lingkup, acuan normatif, perubahan tabel batas maksimum residu pestisida, serta cara uji.
Rapat Teknis 2, 13 September 2024	revisi terkait istilah dan definisi, prosedur pelayuan, pemotongan, dan perubahan istilah pengkelasan menjadi pengelompokan
Rapat Konsensus, 3 Oktober 2024	Dalam rapat ini disepakati beberapa perubahan pada prakata, acuan normatif, metode uji, dan bibliografi.
Jajak Pendapat, 22 Oktober - 22 Nopember 2024	Pelaksanaan jajak pendapat dilakukan oleh stakeholder terkait dengan memberikan masukan yang bersifat editorial.
12 Desember 2024	Penetapan menjadi SNI berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 554/KEP/BSN/2024 tentang Penetapan SNI 9289:2024 Pedoman Proses bawang merah (<i>Allium cepa</i> var. <i>ascalonicum</i> syn <i>Allium cepa</i> var. <i>aggregatum</i>) konsumsi

4.2 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)

4.2.1 Operasionalisasi LSPro

Perkembangan pola hidup dan kebutuhan konsumen mensyaratkan adanya jaminan keamanan produk termasuk kehalalan produk sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat untuk produk yang dikonsumsi. Sedangkan dari sisi produsen, adanya jaminan keamanan dan kehalalan produk dapat semakin menyakinkan konsumen terutama telah adanya sertifikasi produk yang dihasilkan. Salah satu bentuk sertifikasi produk yang tepat yaitu penerapan ISO:17065 sebagai panduan internasional tentang kriteria untuk lembaga yang akan menjalankan sistem sertifikasi produk. Sistem tersebut dijalankan mulai dari proses pembuatan produk, proses, hingga jasa. Lembaga sertifikasi harus memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Sertifikasi produk merupakan suatu langkah konkrit dalam upaya peningkatan mutu/kualitas suatu produk dan berdaya saing. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 75/Permentan/OT.140/ 2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 54/Permentan/PP.140/11/2016. Berdasarkan Peraturan tersebut, maka LSPro pascapanen pertanian diperlukan untuk menjamin mutu dan kualitas produk dengan membentuk unit layanan LSPro dan LPH di BBPSI Pascapanen supaya mampu meningkatkan jumlah dan jenis layanan yang diberikan BBPSI Pascapanen kepada mitra/stakeholder, sehingga menjadi layanan yang terintegrasi dengan layanan lainnya.

Pada tahap persiapan operasionalisasi LSPro, BBPSI Pascapanen telah melakukan kegiatan peningkatan kompetensi personel dengan mengikuti beberapa pelatihan dan bimbingan teknis, yaitu : (1) Pelatihan pemahaman ISO 17065:2012, (2) Pelatihan pemahaman skema sertifikasi dan prosedur gula palma, (3) Pelatihan proses pengolahan dan pengujian mutu kakao (SNI 2323:2008); pati sagu dan tapioka (SNI 3729:2023 dan SNI 3451:2021); mutu padi (SNI 6128:2020), dan (4) Pelatihan teknis untuk audit serta petugas pengambil contoh bidang pertanian.

Pada tahun 2024, LSPro BBPSI Pascapanen telah melakukan sertifikasi kesesuaian mutu SNI Gula Palma di PT Osyara Mitra Gemilang (PT OMG) di Cianjur. Hasil audit menunjukkan bahwa produk gula palma PT OMG memenuhi persyaratan standar SNI 3743:2021. Secara umum, PT OMG memiliki peralatan yang lengkap dalam satu line proses untuk produksi gula semut. Peralatan yang tersedia meliputi wajan besar untuk evaporasi (khusus gula cair), penyaring, grinder, oven pengering dan alat pengemas yang otomatis sehingga ini menjadi potensi untuk mendapatkan sertifikat. Pada proses sertifikasi, kelengkapan dokumen juga sangat penting sehingga tim LSPro BBPSI Pascapanen memberikan bimbingan dalam penyusunan dokumen mutu berupa panduan mutu yang memuat antara lain komunikasi Lembaga, personel, kompetensi kemampuan tugas dan wewenang personel, prosedur rekrutmen personel, prosedur peningkatan kemampuan personel, fasilitas, prosedur pemeliharaan, pemantauan fasilitas, peralatan, pengoperasian, pemeliharaan, mitra pihak eksternal, bahan baku, proses produksi (Gambar 8.)



Gambar 8. Kunjungan dan peninjauan calon klien sertifikasi

4.2.2 Operasionalisasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Sertifikat akreditasi LPH BBPSI Pascapanen telah diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama pada tanggal 5 April 2024 dengan no akreditasi REG RI LH A-1P149A000000000000000010743224 (Gambar 12). Seiring dengan terbitnya sertifikat tersebut, maka LPH BBPSI Pascapanen dapat melakukan persiapan operasionalisasi LPH dengan melakukan koordinasi dengan Komisi Fatwa MUI, registrasi auditor halal, integrasi siHalal, SOP dan pengaturan mekanisme keuangan LPH, mekanisme administrasi internal LPH, koordinasi dengan SDM Syariah, penetapan komite ketidakterpikah dan perbaikan/perubahan struktur, tugas dan wewenang sesuai dengan perkembangan manajemen balai, sosialisasi dan promosi/pengenalan LPH, diskusi dan koordinasi dengan LPH lain terkait manajemen LPH.



Gambar 9. Sertifikat akreditasi LPH BBPSI Pascapanen

Proses asesmen akreditasi LPH dilakukan oleh tim asesor dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang terdiri dari dua asesor teknis dan satu asesor syariah. Asesmen mengacu pada SNI ISO/EIC 17065: 2012, dan mengacu pada peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 1 Tahun 2023. Asesmen dilaksanakan secara luring atau lapangan (Gambar 13). Metode yang digunakan saat interview dengan SDM terkait, observasi, dan review rekaman dan dokumen.

Salah satu upaya dalam mendukung beroperasional LPH, BBPSI Pascapanen mengikuti beberapa kegiatan untuk peningkatan kompetensi personel, diantaranya : (1) Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha), (2) Pelatihan alur sertifikasi halal, (3) Pelatihan penentuan titik kritis halal pada produk pangan, (4) Bimbingan teknis Operasionalisasi LPH, (5) Pelatihan Droplet Digital (ddPCR) untuk Autentikasi Halal Produk Berbasis Gelatin serta (6) Pelatihan "*Understanding Halal Principles in The Halal Food Industry*".



Gambar 10. Kegiatan asesmen akreditasi LPH

Sejak terakreditasinya LPH BBPSI Pascapanen Pertanian, maka LPH sudah diperbolehkan untuk melakukan proses pemeriksaan halal. Sampai dengan bulan Desember 2024 telah dilakukan kegiatan pemeriksaan halal terhadap enam pelaku usaha, yang terdiri dari tiga dari ruang lingkup Jasa penyembelihan dan tiga dari RL makanan dan minuman. LPH BBPSI Pascapanen Pertanian telah 3 kali melakukan audit pemeriksaan halal dalam rangka sertifikasi halal yang diajukan oleh Rumah Potong Unggas/Tempat Pemotongan Unggas (TPU) antara lain CV Fadilah, Ciseeng Kabupaten Bogor; CV Sukro Group, Pondok Gede, Bekasi dan PT Mustapa Jaya Mandiri, Bojong Gede Kabupaten Bogor.



Gambar 11. Kegiatan audit/pemeriksaan halal lingkup jasa penyembelihan

Pada lingkup usaha makanan dan minuman LPH Pascapanen melakukan audit sertifikasi halal yang diajukan oleh air isi ulang Raufa, Jasinga, Pondok Nasi Bakar JJS, dan Pondok Sagu Metro.



Gambar 12. Kegiatan audit/pemeriksaan halal lingkup usaha makanan dan minuman

4.3 Pengelolaan Sekretariat *Mirror Committee Codex*

Harmonisasi standar merupakan bagian penting dalam siklus kegiatan standarisasi nasional. Kegiatan harmonisasi standar merupakan upaya dalam rangka penyelarasan standar baik lingkup global, regional maupun nasional dengan standar yang ada. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, pasal 29 dan 30, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi

standar instrumen di bidang pertanian. BB PSI Pascapanen Pertanian sebagai Unit Pelaksana Teknis BSIP mendapatkan mandat untuk mengelola sekretariat *Mirror Committee* (MC) *Codex* khususnya terkait komite *codex residu pestisida/ Codex Committee on Pesticide Residue* (CCPR).

Indonesia merupakan salah satu anggota *Codex Alimentarius Commission* (CAC) sehingga perlu berperan aktif termasuk pengumpulan data dukung terkait pembahasan permasalahan dalam sidang. BBPSI Pascapanen Pertanian sebagai koordinator *Mirror Committee Codex Committee on Pesticide Residue* (CCPR) perlu menyiapkan data dukung ilmiah terkait residu pestisida untuk persiapan pelaksanaan sidang CCPR selanjutnya sekaligus sebagai salah satu masukan kondisi keamanan pangan residu pestisida pada hasil budidaya pertanian.

Sidang *Codex Committee on Pesticide Residue* (CCPR) menghasilkan beberapa pokok bahasan yang perlu ditindaklanjuti. Beberapa prioritas evaluasi bahan aktif pestisida dengan rincian sebagai berikut:

1. *New compound* dengan 6 bahan aktif terdiri dari XDE-659 (Florylpicoxamid); Fluoxapiprolin (BCS-CS55621); SYN522 (Cyclobutrifluram); Carfentrazone; Fenpropidin; Florpyrauxifen-benzyl (XDE-848).
2. *New-use and other* dengan 17 bahan aktif terdiri dari Flupyradifurone (285); Azoxystrobin (229); Lambda-cyhalothrin (146); Buprofezin (173); Etofenprox (184); Flubendiamide (242); Tebufenozide

(196); Tetraniliprole (324);
Pydiflumetofen (309);
Acibenzolar (288); Spinosad
(203); Cyproconazole
(239); Novaluron (217);
Tebuconazole (189);
Thiamethoxam (245);
Hexythiazox (176);
Chlormequat (15).

3. *Periodic review* dengan 8 bahan aktif terdiri dari Chlorpyrifos(17);Chlorpyrifos-methyl (90); Fipronil (202); Maleic hydrazide (102); Phosmet (103); Folpet (041); Ethoxyquin (35); Fenpyroximate (193).

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator *Mirror Committee* (MC) *Codex* khususnya terkait komite *codex residu pestisida/Codex Committee on Pesticide Residue* (CCPR), BBPSI Pascapanen melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Penyampaian posisi Indonesia melalui *Conference room document* (CRD) pada Sidang CCPR ke-55 tanggal 3 – 8 Juni 2024 di Chengdu-Sichuan, China dan diikuti secara *online webcast* dengan masukan di antaranya : terkait batas maksimum residu pestisida yang dibahas, Usulan prioritas evaluasi bahan aktif pestisida dan Ekstrapolasi *Maximum Residue Limits* (MRLs) terung dari MRLs cabe dan tomat
- b. Keikutsertaan Indonesia dalam 5 *Electronic working group* (EWG) yaitu bahan standar pestisida; kerjasama CCPR-CCRVD, CCPR-JMPR, *unsupported compound* dan prioritas reuview bahan aktif pestisida

- c. Indonesia menyampaikan 3 tanggapan *circular letter* terkait:

1. Registrasi data base pestisida;
2. List prioritas reuview bahan aktif pestisida yang dibahas; dan
3. Panduan monitoring kemurnian-kestabilan Certified Reference Material (CRM) pestisida selama penyimpanan

- d. Koordinasi dan kolaborasi seluruh *stakeholder* melalui:

rapat penyusunan data dukung sidang CCPR ke-54 pada: 8 Mei dan 22 Mei 2024 dan rapat tindak lanjut hasil sidang CCPR ke-55 dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2024.

- e. Sosialisasi hasil Sidang CCPR 55 tahun 2024 (Gambar 13)



Gambar 13. Rapat sosialisasi hasil sidang CCPR ke-54

4.4 Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)

Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2014, tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, PNPS adalah usulan rancangan SNI dari pemangku kepentingan (stakeholder) yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Di dalam perencanaan perlu memperhatikan rencana pembangunan dan kebijakan nasional. Perumusan SNI pada dasarnya merupakan akumulasi pengetahuan, teknologi dan pengalaman dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pencapaian kesepakatan atau konsensus. Dengan mengacu pada PNPS, maka perumusan SNI dilakukan dengan memperhatikan waktu penyelesaian yang efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada seluruh *stakeholder* bidang pertanian menghadapi era persaingan global untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui sektor pertanian yang maju, mandiri dan modern, maka agrostandar merupakan suatu program strategis BSIP dalam menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (seperti benih/bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan, hilirisasi, kerjasama internasional, dan lain-lain).

Balai Besar PSI Pascapanen Pertanian akan bertindak sebagai pembina pengembangan agrostandar khususnya di bidang pascapanen pertanian. Kegiatan "Perumusan PNPS bidang pascapanen pertanian tahun 2023" telah menghasilkan 6 judul PNPS tahun 2024, yaitu: (1) Penanganan pascapanen bawang merah untuk konsumsi; (2) Proses pascapanen daun rajangan kering talas beneng; (3)

Metode pengukuran susut pascapanen padi; (4) Batas Cemaran Residu pestisida; (5) Penanganan bunga krisan potong; dan (6) Metode deteksi infestasi kutu beras. Judul PNPS nomor 5 dan 6 ditunda pengusulannya ke BSN, dan akan dipertimbangkan diusulkan kembali tahun 2025. Judul PNPS No. 1 - 4 telah disetujui menjadi PNPS 2024 dan diproses hingga menjadi RSNI3. Pada akhir tahun 2024, seluruh RSNI3 tersebut telah ditetapkan oleh BSN menjadi SNI sebagai berikut: (1) SNI 9289:2024 Pedoman proses pascapanen bawang merah (*Allium cepa* var. *ascalonicum* syn *Allium cepa* var. *aggregatum*) konsumsi; (2) SNI 9279:2024 Pedoman proses pascapanen daun talas beneng (*Xanthosoma undipes* K. Koch); (3) SNI 9306:2024 Metode pengukuran susut pascapanen padi (*Oryza sativa* L.); dan (4) SNI 7313:2024 BMR Pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan.

Dalam menghimpun data dan masukan terkait judul PNPS dilakukan koordinasi dengan Ditjen Teknis sehingga diharapkan PNPS yang disusun merupakan kebutuhan yang nantinya akan bermanfaat bagi petani dan pelaku usaha (Gambar14). Dari hasil diskusi dan koordinasi serta mengingat cakupan ruang lingkup komtek 65-22 Pascapanen Pertanian adalah menangani produk segar asal tumbuhan sehingga disepakati pada tahun 2025 usulan PNPS bidang pascapanen diantaranya :

1. Proses berasan jagung
2. Pengeringan cabai
3. Proses pascapanen lada
4. Batas Maksimum Cemaran Mikrobiologi pada hasil pertanian siap edar



Gambar 14. Koordinasi dengan Ditjen lingkup Kementan

V. INSTRUMEN MUTU PASCAPANEN PERTANIAN YANG DIUJI

5.1 Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium

Laboratorium Pengujian BBPSI Pascapanen Pertanian telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017, meliputi laboratorium Kimia, Fisik dan Nanoteknologi, Mikrobiologi, serta Instalasi laboratorium mutu beras dan pascapanen serealisa yang didukung oleh peralatan pengujian dan personel yang kompeten. Parameter dan matriks ruang lingkup akreditasi terdiri dari analisis proksimat (matriks susu bubuk dan biskuit), kadar amilosa (matriks tepung beras), partikel size analyzer (matriks cairan), kekentalan pati Rapid Visco analyzer (matriks bahan berpati), residu pestisida untuk malation dan klorpirifos (matriks sayur dan buah), Angka Lempeng Total (matriks teh dan tepung) serta mutu gabah dan beras. semua kegiatan pengujian selalu dilaksanakan berdasarkan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017, guna memberikan jaminan konsistensi dan kompetensi teknis pengujian dalam ruang lingkup kegiatannya.

Laboratorium BBPSI Pascapanen Pertanian merupakan laboratorium kompeten yang terdaftar sebagai laboratorium terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LP-366-IDN dan sebagai laboratorium PUP (Penyelenggara Uji Profisiensi) ISO 17043:2023 dengan nomor PUP-024-IDN. Sampai dengan tahun 2024, BBPSI Pascapanen Pertanian masih menjadi satu-satunya di Indonesia sebagai laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) dengan matriks beras dengan parameter uji meliputi kadar air, butir patah, butir kepala, kadar amilosa dan derajat sosoh.

Selama periode Januari – Desember 2024, BBPSI Pascapanen Pertanian telah menerima sampel sebanyak 1.005 sampel dengan persentase pelanggan dari swasta sejumlah 17,03%, Instansi pemerintah sejumlah 25,76% dan mahasiswa sejumlah 57,21% serta jumlah LHU yang diterbitkan sebanyak 212 LHU (106,53% - tercapai). Selain itu, penerimaan PNPB Laboratorium



Gambar 15. Sertifikat akreditasi lab.BBPSI Pascapanen

Pengujian BBPSI Pascapanen mencapai 291.371.250 dengan persentase pencapaian 118,93%. Laboratorium Pengujian BBPSI Pascapanen dengan nomor akreditasi LP-366-IDN dan PUP-024-IDN dapat mempertahankan status akreditasinya berdasarkan verifikasi tindakan perbaikan Re-akreditasi PUP BBPSI Pascapanen Pertanian telah memenuhi oleh KAN dan dinyatakan *closed*.

5.2 Pembentukan Jejaring Basis Data Komposisi Pangan Asia

Data komposisi pangan merupakan salah satu alat ukur yang sangat penting untuk menyusun menu dan menilai kecukupan asupan konsumsi pangan individu dan kelompok dalam satu wilayah maupun negara. Data komposisi pangan yang lengkap diperlukan masyarakat sebagai sumber informasi dalam memilih dan mengkombinasikan pangan sehat menurut kandungan gizinya. Indonesia telah memiliki data komposisi pangan yang disusun dalam Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI), saat ini masih memiliki kekurangan, yaitu masih cukup banyak bahan makanan yang memiliki nilai zat gizi tidak lengkap (*missing*) dan jumlah item bahan makanan dalam TKPI belum cukup mewakili bahan makanan yang banyak dan sering

dikonsumsi di Indonesia. Oleh karena itu, data komposisi pangan di Indonesia saat ini masih terus dikembangkan. Manfaat TKPI dalam perencanaan pangan nasional dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan pangan masyarakat Indonesia, kualitas pangan, dan digunakan praktisi gizi di pelayanan kesehatan dalam memberikan konseling gizi kepada klien, atau digunakan langsung oleh rumah tangga dan masyarakat.

Kegiatan ini merupakan kegiatan *multi years* yang dilakukan dalam waktu tiga tahun untuk memperoleh data dan informasi komponen gizi sejumlah 100 jenis bahan pangan dan pertanian. Data ini juga merupakan salah satu upaya dalam melestarikan keanekaragaman hayati di wilayah Indonesia dengan mengamankan informasi nutrisi pada produk pangan dan pertanian. Jejaring yang dibangun dengan Pokja DKPI diharapkan sebagai langkah awal untuk membangun jejaring dalam pengembangan basis data komposisi pangan Indonesia, karena untuk tahap selanjutnya peran steering committee akan cukup besar dalam sharing informasi dan diskusi di lingkup basis jejaring basis data komposisi pangan Asia.

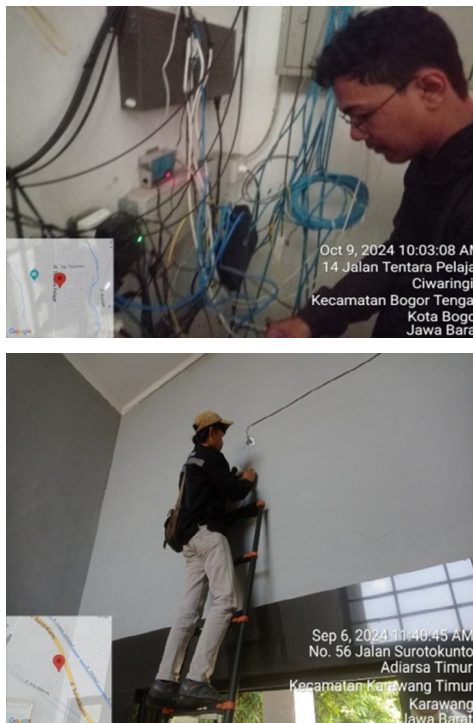
Tabel 10. Rekapitulasi komoditas, lokasi, dan waktu pengambilan sampel

No	Commodity	Location	Sampling Time
1	Rice, mixed 3 colors, dry milled	Market, Jabodetabek (City)	12.05.2023
2	Popcorn,raw	Market, Jabodetabek (City)	11.23.2023
3	Corn flakes, instant, dry	Market, Jabodetabek (City)	12.05.2023
4	Oat meal, instant, dry	Market, Jabodetabek (City)	11.23.2023
5	French fries, frozen	Market, Jabodetabek (City)	11.22.2023
6	Sweet potato var Cilembu, Root, Roasted	Market, Jabodetabek (City)	11.13.2023
7	Mung beans, peeled	Market, Jabodetabek (City)	12.05.2023
8	Okra	Lembang, Bandung (City), West Java (Province)	10.19.2023
9	Siomak	Lembang, Bandung (City), West Java (Province)	10.19.2023
10	Radish	Lembang, Bandung (City), West Java (Province)	10.19.2023
11	Japanese Cucumber	Lembang, Bandung (City), West Java (Province)	10.20.2023
12	Red Radish	Lembang, Bandung (City), West Java (Province)	10.20.2023
13	Bitter melon	Lembang, Bandung (City), West Java (Province)	10.23.2023
14	Eggplant	Sindangjaya, Cipanas, Cianjur (City), West Java (Province)	10.24.2023
15	Butterhead Lettuce	Market, Jabodetabek (City)	10.31.2023
16	Eggplant var Medan	Sindangjaya, Cipanas, Cianjur (City), West Java (Province)	10.31.2023
17	Eggplant var Round	Sindangjaya, Cipanas, Cianjur (City), West Java (Province)	10.31.2023
18	Romaine lettuce	Sindangjaya, Cipanas, Cianjur (City), West Java (Province)	11.10.2023
19	Eggplant var Japanese	Market, Jabodetabek (City)	11.13.2023
20	Kabocha squash	Lembang, Bandung (City), West Java (Province)	10.19.2023
21	Kabocha squash	Sindangjaya, Cipanas, Cianjur (City), West Java (Province)	10.24.2023
22	Butternut squash	Sindangjaya, Cipanas, Cianjur (City), West Java (Province)	10.25.2023
23	Mixed vegetables, frozen	Market, Jabodetabek (City)	11.22.2023
24	Snow white seafood mushroom	Market, Jabodetabek (City)	11.10.2023
25	White Shimeji Mushroom	Market, Jabodetabek (City)	11.10.2023
26	Enoki Mushroom	Market, Jabodetabek (City)	11.10.2023
27	King Oyster Mushroom	Market, Jabodetabek (City)	11.10.2023
28	Shitake Mushroom	Market, Jabodetabek (City)	11.10.2023
29	Portobello Mushroom	Market, Jabodetabek (City)	11.13.2023
30	Brown Shimeji Mushroom	Market, Jabodetabek (City)	11.13.2023
31	Quail egg, boiled	Market, Jabodetabek (City)	11.22.2023

VI. DUKUNGAN MANAJEMEN

6.1 Pelaksanaan Pengelolaan BMN

Terlaksananya pelayanan kerumah tanggaan dan tata usaha meliputi urusan tata kelola surat menyurat, kearsipan, pelayanan agenda rapat dinas, pelayanan komunikasi oleh operator, tata kelola perawatan kebersihan gedung dan lingkungan, serta pengendalian keamanan kantor. Selama tahun 2024 telah dilakukan inventarisasi terhadap aset, pengembangan aplikasi siaset, penghapusan aset (kendaraan roda 4) dan hibah aset RMU di Banyuasin yang masih dalam proses.



Gambar 16. Pemeliharaan aset di Bogor dan Karawang

6.2 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

Kegiatan penyebarluasan informasi dilakukan secara berkelanjutan selama periode satu tahun. Informasi yang disampaikan adalah tentang kebijakan, program, kegiatan dan layanan yang ada di BBPSI Pascapanen Pertanian dengan keterbukaan informasi sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penyebarluasan informasi yang harus diketahui oleh masyarakat telah dilaksanakan melalui :

- Penyebarluasan hasil standardisasi melalui sosialisasi, webinar, website, media sosial (FB, IG, Twitter), youtube, brosur/leaflet, poster, media elektronik, media cetak (SNI 30 kali, informasi publik setiap bulan);
- Penyebarluasan informasi publik melalui layanan konsultasi (70 orang), kunjungan/studi banding (13 kali), dan magang/PKL (50 orang);

Responden untuk layanan konsultasi sebanyak 70 pemohon, berusia antara 21 – 30 tahun, berumur <21 tahun dan 31 – 40 tahun, dimana usia tersebut adalah usia mahasiswa dan pekerja. Sebagian besar pemohon merupakan mahasiswa sebesar 45,71% atau 32 orang dan pegawai swasta 32,86% atau 23 orang.

BBPSI Pascapanen Pertanian menerima kunjungan/studi banding mulai dari pelajar,

mahasiswa, swasta, lembaga pemerintahan dan asosiasi baik dari dalam dan luar negeri. Agenda yang umumnya dilaksanakan pada kegiatan kunjungan adalah penyampaian profil BBPSI Pascapanen Pertanian, penyampaian maksud dan tujuan oleh perwakilan peserta kunjungan, diskusi serta dilanjutkan dengan kunjungan ke laboratorium-laboratorium yang ada di BBPSI Pascapanen.

Salah satu layanan di BBPSI Pascapanen Pertanian yang paling banyak peminatnya adalah Magang atau PKL. Sampai

bulan Desember 2024, BBPSI Pascapanen Pertanian sudah menerima lebih dari 50 peserta magang/PKL yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia (Tabel 12).

- c. Pelaksanaan pelatihan pelayanan informasi dan pelayanan prima Pelatihan Pelayanan Publik dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dari BBPSI Pascapanen Pertanian untuk mendukung program Kementerian Pertanian dalam menyediakan pelayanan dan keterbukaan publik yang transparan kepada masyarakat dengan pelayanan yang

Tabel 11. Peserta kunjungan selama kurun waktu Januari-Desember 2024

No	Waktu (Bulan)	Asal Peserta Kunjungan
1	Januari	Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2	Februari	SMA Bina Insan Mandiri; SMA Bunda Hati Kudus
3	Maret	Asosiasi Beyond Moringa Indonesia; Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	Mei	Asosiasi Pemerintah Desa Kabupaten Aceh Timur; Delegasi Korea Agriculture Technology Promotion Agency (KOAT)
5	Juni	Universitas Nasional; Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia (PEPI)
6	September	SMP Islam As-Syukriyyah
7	November	Universitas Ibn Khaldun, Bogor; Universitas Lancang Kuning, Riau
8	Desember	Univeritas Kristen Indonesia x Don Mariano Marcos Memorial State University, Filipina

Tabel 12. Peserta magang/PKL kurun waktu Januari-Desember

No	Asal Sekolah/Perguruan Tinggi	Lama waktu (bulan)	Jumlah (orang)
1	SMK Taruna Terpadu 2	2	1
2	SMK Negeri Cibadak	6	1
3	Universitas Brawijaya	2	4
4	Universitas Andalas	4	11
5	Universitas Bengkulu	2	2
6	Universitas Juanda	1	1
7	Vokasi IPB	1-4	5

sebaik - baiknya. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari Ombudsman RI dan dari swasta yaitu General Manager Hotel Sahid.



Gambar 17. Pelatihan Pelayanan Publik

d. Pelaksanaan evaluasi Layanan Publik

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau Penyelenggara dan Penyelenggaraan Badan Publik

lainnya sesuai dengan UU KIP serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Kementerian Pertanian - selaku salah satu badan publik - berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik. BBPSI Pascapanen telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dibuktikan dengan dokumen Laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan, Laporan Kegiatan yang didalamnya terdapat hasil evaluasi kuesioner peserta. Hasil Survei ini perlu dievaluasi untuk mendapatkan kendala dan solusi dari penilaian pelanggan. Jumlah koresponen pada Semester I 2024 berjumlah 118 responden, sedangkan Semester II 2024 berjumlah 196 responden.

Untuk evaluasi peningkatan kualitas publik BBPSI Pascapanen melaksanakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan menggunakan perangkat Google Form.

Tabel 13. Nilai Indeks unit pelayanan dan Mutu Unit Pelayanan Semester I dan II 2024

No	Uraian	Semester 1 2024	Semester 2 2004
1	Nilai Indeks unit pelayanan	3,636	3,570
2	Nilai IKM setelah dikonevsi	90,89	89,25
3	Mutu pelayanan	A	A
4	Kinerja unit pelayanan	Sangat baik	Sangat baik

Pelaksanaan survei ini digabung dan direkap setiap 3 bulan sekali selama satu tahun sehingga terdapat 4 triwulan.

Penilaian KIP tahun 2024 ini, BBPSI Pascapanen Pertanian memperoleh predikat INFORMATIF yang sertifikatnya diserahkan langsung oleh Wamen Sudaryono pada malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian tanggal 6 Desember 2024 di ICC IPB Bogor.



Gambar 18. Sertifikat Keterbukaan Informasi Publik

Tabel 14. Nilai persepsi kualitas pelayanan (SPKP) masyarakat pada setiap unsur pada setiap Triwulan

Unsur	Nilai rata rata skala 4			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
U1	3,35	3,29	3,46	3,61
U2	3,47	3,38	3,57	3,54
U3	3,37	3,45	3,54	3,52
U4	3,17	3,31	3,25	3,49
U5	3,31	3,43	3,41	3,47
U6	3,35	3,38	3,52	3,59
U7	3,25	3,42	3,52	3,62
U8	3,29	3,38	3,46	3,57
Indeks SPKP	3,32	3,38	3,47	3,55

Tabel 15. Nilai persepsi anti korupsi pada setiap unsur pada setiap Triwulan

Unsur	Nilai rata rata skala 4			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
U1	3,65	3,59	3,68	3,61
U2	3,57	3,57	3,6	3,57
U3	3,59	3,61	3,68	3,57
U4	3,67	3,64	3,65	3,64
U5	3,65	3,61	3,68	3,64
Indeks SPAK	3,63	3,60	3,66	3,61

6.3 Pelaksanaan Monev, SPI, Manajemen Risiko Index, Reformasi Birokrasi

Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi, BBPSI Pascapanen Pertanian melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, sistem pengendalian internal, manajemen risiko serta reformasi birokrasi. Tim evaluasi melakukan pelaporan meliputi penyusunan LAKIN, Laporan Kegiatan Bulanan BBPSI Pascapanen Pertanian, penyusunan Laporan Tahunan BBPSI Pascapanen Pertanian, penyusunan laporan Sub Koordinator evaluasi, *Up-Dating* Data Kemajuan Kegiatan Bulanan dan Triwulanan secara online pada aplikasi (e-monev BSIP, e-monev Bappenas, e-sakip, monev Smart kemenkeu PMK 214/2023).

6.3.1 Sosialisasi SPI lingkup BBPSI Pascapanen

Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun kesadaran seluruh pegawai BBPSI pascapanen Pertanian tentang bagaimana pengendalian internal sehingga tujuan kegiatan balai dapat terlaksana secara efektif, efisien dan transparan. SPI merupakan unsur yang diperlukan dalam reformasi birokrasi terutama dalam unsur pengawasan di setiap aspek termasuk juga bagaimana penggunaan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sosialisasi SPI merupakan agenda tahunan karena pengendalian SPI dilakukan terus menerus dalam organisasi untuk membentuk budaya kerja yang sesuai.

UPG (Unit Pengelolaan Gratifikasi) merupakan bagian dari SPI. Gratifikasi diatur di dalam UPG, ada gratifikasi

yang tidak boleh dan ada yang boleh. Gratifikasi yang tidak boleh yang bersifat kedinasan, yang diperbolehkan bersifat asenda. Supaya pemberian tidak menjadi gratifikasi maka harus dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari, jangan dibawa pulang, dibersifat umumkan. Gratifikasi dalam kedinasan adalah honorarium, hadiah, tidak boleh melebihi pagu dan sesuai SBM.

Salah satu bentuk pengendalian gratifikasi adalah narasumber tidak boleh menerima honorarium dari K/L yang sama, termasuk juga biaya perjalanan. Hal ini perlu dipahami oleh seluruh pegawai lingkup BBPSI Pascapanen Pertanian.

Salah satu kelemahan dalam penilaian SPI adalah penilaian manajemen risiko, Sub penilaian risiko saat ini menunjukkan nilai paling kecil diantara unsur SPI lainnya masih kurangnya penerapan manajemen risiko. Pada perpres 12 tahun 2020 secara tegas menyebutkan bahwa MRI harus ada di level 3 sebagai indikator capaian di setiap K/L, dengan adanya pengawasan dan pendampingan diharapkan para penjab kegiatan mengetahui titik kritis dari probis kegiatannya agar output tetap tercapai, berharap seluruh pegawai mengetahui bagaimana mengelola risiko dan mengantisipasi serta memitigasi risiko yang dapat terjadi.

Selama tahun 2024 Sub Unit Pengelola Gratifikasi BBPSI Pascapanen Pertanian telah menyusun laporan UPG sebanyak dua belas laporan (bulan Januari s.d Desember 2024). Berdasarkan hasil rekapitulasi pengelolaan UPG di BBPSI Pascapanen periode Januari s.d Desember tahun 2024 menerima empat laporan gratifikasi dari pejabat struktural/pegawai BBPSI Pascapanen berupa oleh-oleh makanan

dan honorarium narasumber berupa uang honor selanjutnya laporan tersebut sudah ditindaklanjuti.

Rendahnya laporan gratifikasi di tahun 2024 dikarenakan kesadaran pegawai untuk melaporkan terkait gratifikasi masih rendah, kekurangpahaman pegawai terhadap bentuk dan jenis gratifikasi, upaya untuk meningkatkan pelaporan gratifikasi telah dilakukan dengan cara mengingatkan baik melalui wa grup maupun surat resmi kepada pegawai agar dapat melaporkan terkait gratifikasi.

Selain melakukan pengendalian gratifikasi dilakukan juga dengan unit pengaduan Masyarakat. Selama tahun 2024 UPP-Dumas BBPSI Pascapanen

Pertanian telah menyusun laporan sebanyak dua belas laporan (bulan Januari.s.d Desember 2024). Berdasarkan hasil rekapitulasi pengelolaan Dumas di BBPSI Pascapanen periode Januari s.d Desember tahun 2024, terdapat pengaduan terkait pelayanan publik teknis maupun administratif sebanyak 3 aduan terkait hasil analisis kadar air yang sangat rendah pada sampel tepung Pengaduan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan melakukan hasil analisis ulang tersebut sudah sesuai standar dan sudah terselesaikan. Laporan pengaduan pelayanan di BBPSI Pascapanen Pertanian dapat dilakukan melalui website, telepon dan SMS, maupun kotak saran.

Tabel 16. Laporan gratifikasi

No	Jenis/Bentuk Gratifikasi	Nama Penerima Gratifikasi	Tanggal Penerimaan Pemberian	Hubungan dengan Pemberi Gratifikasi
1	Oleh-oleh makanan	Erwan Gustiawan A, S.Com	22 Januari 2024	Kunjungan Agrowisata Mahasiswa, Universita Muhamadiyah, Bengkulu
2	NIHIL	--	FEBRUARI	--
3	NIHIL	--	MARET	--
4	NIHIL	--	APRIL	--
5	Honor Narasumber	Kun Tanti Dewandari, S.TP.,M.Si.	03 April 2024	Perumus RSNI Lingkup Komite Teknis 65-10 BSN
6	Honor Narasumber	Kun Tanti Dewandari, S.TP.,M.Si.	29 April 2024	Perumus RSNI Lingkup Komite Teknis 65-10 BSN
7	Honor Narasumber	Kun Tanti Dewandari, S.TP.,M.Si.	13 Mei 2024	Perumus RSNI Lingkup Komite Teknis 65-10 BSN
8	NIHIL	--	JUNI	--
9	NIHIL	--	JULI	--
10	NIHIL	--	AGUSTUS	--
11	NIHIL	--	SEPTEMBER	--
12	NIHIL	--	OKTOBER	--
13	NIHIL	--	NOVEMBER	--
14	NIHIL	--	DESEMBER	--

Tabel 17. Rekapitulasi pengaduan masyarakat

No.	Bulan	Nama Pengadu	Nama/Jenis/Uraian Pengaduan	Hasil Penyelesaian Pengaduan
1	Januari	Dr. Sri WIdowati, MappSc	Terkait hasil analisis Proksimat yang tidak wajar terutama analisis kadar air yang sangat rendah pada sampel tepung	Hasil analisis sudah sesuai dan wajar
2	Februari	--	Nihil	--
3	Maret	--	Nihil	--
4	April	--	Nihil	--
5	Mei	--	Nihil	--
6	Juni	--	Nihil	--
7	Juli	--	Nihil	--
8	Agustus	--	Nihil	--
9	September	--	Nihil	--
10	Oktober	--	Nihil	--
11	November (13 November 2024)	Tri Adi Setiawan (PT.Wilmar Padi Indonesia-Ngawi)	Penentuan nilai derajat sosok bersifat kualitatif dengan menggunakan visual, yang dimana nila hasil yang berbeda-beda antar laboratorium	Berdasarkan hasil penelusuran telah dilakukan pengecekan terhadap pengaduan tersebut, dan menyatakan bahwa tidak terdapat kekeliruan dalam penyelenggaraan Uji Profisiensi
12	November (14 November 2024)	Dhika Oktafian (PT. Wilmur Padi Indonesia-Serang)	Terkait uji profisiensi parameter uji derajat sosok dari hasil uji yang dilakukan oleh tim laboratorium	Berdasarkan hasil penelusuran telah dilakukan pengecekan terhadap pengaduan tersebut, dan menyatakan bahwa tidak terdapat kekeliruan dalam penyelenggaraan Uji Profisiensi
13	Desember	--	Nihil	--

6.3.2 Monitoring Program Strategis Kementan

Kegiatan Monitoring Program Strategis Kementerian Pertanian TA 2024 ini dilakukan sebagai bagian dari Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan yang melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab lapangan di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah, untuk optimasi lahan, pompanisasi, dan penambahan areal tanam padi gogo tahun 2024,

melalui kegiatan: (1) Pendampingan kegiatan optimasi lahan, pompanisasi dan penambahan areal tanam untuk peningkatan produksi padi di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi tanggungjawab masing-masing; (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan optimasi lahan, pompanisasi, dan penambahan areal tanam untuk peningkatan produksi padi; dan (3) Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan optimasi lahan, pompanisasi, dan penambahan areal tanam untuk

peningkatan produksi padi secara rutin kepada Menteri melalui Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dengan aplikasi yang tersedia sesuai program strategis Kementerian Pertanian yang menargetkan Swasembada Pangan, khususnya padi pada tahun 2024 untuk keberlanjutannya.

Penyusunan rencana kegiatan pompanisasi dan padi gogo dimulai dengan melakukan identifikasi terkait

potensi perluasan areal tanam di provinsi Sulawesi Barat. Dalam perjalanannya, telah terjadi beberapa kali perubahan target Perluasan Areal Tanam sawah tadah hujan dan padi gogo di Provinsi Sulawesi Barat. Berikut identifikasi target Perluasan Areal Tanam yang terdapat di Provinsi Sulawesi Barat berdas arkan SK awal hingga terbaru.

Tabel 18. Target PAT Provinsi Sulawesi Barat

No	KABUPATEN	TARGET PAT BERDASARKAN SK NOMOR 194/KPTS/ OT.050/M/03/2024		TARGET PAT BERDASARKAN SK NOMOR 234/KPTS/ OT.050/M/04/2024		TARGET PAT BERDASARKAN SK NOMOR 266/KPTS/ OT.050/M/06/2024	
		POMPANISASI (Ha)	PADI GOGO (Ha)	POMPANISASI (Ha)	PADI GOGO (Ha)	POMPANISASI (Ha)	PADI GOGO (Ha)
1	MAJENE	-	2030	620	2030	236	1147
2	POLEWALI MANDAR	1245	4679	1245	4679	2992	1389
3	MAMASA	6565	-	1437	-	4075	783
4	MAMUJU	1969	881	8546	881	2427	404
5	PASANGKAYU	-	1344	-	1344	75	1305
6	MAMUJU TENGAH	467	264	3767	264	655	812
TOTAL		10246	9199	15671	9198	10460	5839

VII. KINERJA ANGGARAN

Pada tabel 18 disajikan realisasi anggaran BBPSI Pascapanen sampai tanggal 22 Januari 2025 yaitu sebesar Rp17.367.085.112,- (96,42%).

Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan

fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas yang dipublikasikan menggunakan aplikasi online SMART DJA.

Sampai dengan 22 Januari 2024, capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Pascapanen adalah 96,86 (kategori Sangat Baik), dengan rincian: kualitas perencanaan anggaran sebesar 94.39%, kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 99,02%, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 100%.

Tabel 19. Realisasi Anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian

Jenis Belanja	Pagu Total (Rp)	Pagu efektif (Rp)	Realisasi s/d 22 Januari 2024 (SP2D)		
			Rp	Pagu Total (%)	Pagu Efektif (%)
Belanja pegawai	6.489.850.000,-	6.489.850.000,-	6.375.135.086,-	98,23	98,23
Belanja barang operasional	8.354.968.000,-	8.354.968.000,-	8.330.756.749,-	99,71	99,71
Belanja barang non operasional	3.167.678.000,-	2.676.366.000,-	2.661.193.277,-	84,01	99,43
Total	18.012.436.000,-	17.521.184.000,-	17.367.085.112,-	96,42	99,12

Indikator Pelaksanaan Anggaran													
SAMPAI DENGAN Desember													
Desember													
Download PDF Download Excel													
No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Subter	Uraian Subter	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output
1	Desember	023	018	648609	BALAI BESAR PENGULJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN	Nilai	100,00	88,77	99,39	100,00	100,00	96,71	100,00
						Bobot	10	15	20	10	10	10	25
						Nilai Akhir	10,00	13,32	19,88	10,00	10,00	9,67	25,00
						Nilai Aspek	94.39			99.02			100.00

Gambar 19.Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

VIII. PENUTUP

Keberhasilan pencapaian di tahun 2024 tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran. Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang ditargetkan 4 Rancangan, terealisasi 4 RSNi dan 3 yang telah disampaikan ke BSN. Publikasi banyak dilakukan di media online dan media sosial, sesuai perkembangan jaman yang sedang tren saat ini. Kegiatan tersebut diharapkan terus ditingkatkan kualitasnya sehingga efektivitas kegiatan diseminasi dapat tercapai. Dampak dari kegiatan diseminasi terlihat dengan semakin meningkatnya, kunjungan, bimbingan teknis/pelatihan dan magang teknologi, serta pengiriman publikasi.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BBPSI Pascapanen, telah dilakukan peningkatan kompetensi pegawai sesuai bidang tugas, aplikasi e-personal, sarana dan prasarana termasuk fasilitas laboratorium dan perbaikan website pada tampilan

dan *up-dating* informasinya. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan kegiatan di BBPSI Pascapanen ke depan lebih kondusif sehingga dapat memacu peningkatan kinerja. Balai Besar Pengujian Standarisasi Instrumen Pascapanen Pertanian sesuai surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 24 SP DIPA-018.09.2.648669/2024, tanggal 24 Nopember 2024 memiliki pagu anggaran sebesar Rp18.049.452.000,00. Selama TA. 2024, DIPA BBPSI Pascapanen Pertanian mengalami revisi sebanyak 19 (sembilan belas kali). sehingga anggaran terakhir di BB Pascapanen pada tahun 2024 senilai Rp18.012.436.000,00.

Adapun beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan telah diupayakan untuk diatasi, dan langkah-langkah yang telah ditempuh tersebut dapat dijadikan langkah antisipatif dalam mengatasi hambatan dan kendala yang mungkin dihadapi pada pelaksanaan kegiatan tahun mendatang.



**Jl. Tentara Pelajar No. 12, Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu
Bogor 16114
Telp. 62.251.8321762, Fax. 62.251.8350920
Website: <https://pascapanen.bsip.pertanian.go.id>**